



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAID SUDRAJAD
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 149376

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>		<b>Rp.</b>	<b>435.000.000</b>
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA LINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
3.	Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/10000 m2 di KAB / KOTA LINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
4.	Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/270 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
5.	Tanah dan Bangunan Seluas 570.5 m2/570.5 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>		<b>Rp.</b>	<b>420.000.000</b>
1.	MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
2.	MOBIL, WULING MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>		<b>Rp.</b>	<b>59.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>		<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>Rp.</b>	<b>257.646.833</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>		<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.171.646.833</b>



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.171.646.833

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.